

BAB III

EKSISTENSI DAN KEMENANGAN PARTAI LIKUD DI ISRAEL

Israel merupakan sebuah negara yang terletak di Timur Tengah yang secara geografis dikelilingi oleh Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu, dikelilingi pula dua daerah Otoritas Nasional Palestina yaitu Gaza dan Tepi Barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. (Freedom House 2007) Sebagai negara, Israel tentu memiliki sistem pemerintahan dan unsur-unsur yang dapat menjadi bagian dalam sistem tersebut sehingga roda pemerintahan terus berjalan hingga saat ini. Dalam bab ini penulis akan mengulas mengenai eksistensi partai Likud dalam dunia perpolitikan maupun pemerintahan di Israel. Namun sebelumnya, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem politik dan pemerintahan di Israel serta unsur-unsur yang ada didalamnya seperti badan eksekutif, badan legislatif dan badan yudikatif. Penulis juga tidak lupa akan membahas mengenai partai-partai yang ada di Israel terutama Partai Likud yang menjadi objek penelitian kali ini baik dari segi sejarah partai hingga *track record* kemenangan Partai tersebut.

A. Politik dan Pemerintahan di Israel

Israel merupakan sebuah negara yang berbentuk republik demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer. (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 2016) Dalam pemerintahannya, Israel membagi menjadi tiga kekuasaan utama yaitu Badan Eksekutif, Badan Legislatif dan Badan Yudikatif. Ketiga kekuasaan ini dipisahkan dan mereka bekerja dengan “saling mengawasi” (*check and balance*). Presiden Israel bertugas sebagai

kepala negara, namun tugas-tugasnya sangat terbatas dan hanyalah bersifat seremonial. Anggota parlemen yang didukung oleh mayoritas suara di dalam parlemen nantinya akan menjadi Perdana Menteri. Biasanya seseorang yang menjadi perdana menteri adalah ketua Partai terbesar yang memiliki tingkat popularitas tinggi dalam pemerintahan. Di Israel, Perdana Menteri bertugas sebagai kepala pemerintahan dan ketua kabinet. Israel diperintah oleh 120-anggota parlemennya, yang dikenal sebagai Knesset. Anggota-anggota Knesset merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai partai yang dipilih dalam pemilihan di parlemen dan biasanya pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan koalisi. (THE KNESSET 2014)

Pemilihan parlemen diadakan setiap empat tahun sekali, namun koalisi pemerintahan yang tidak stabil ataupun adanya mosi tidak percaya oleh Knesset seringkali membubarkan pemerintahan yang ada lebih awal. Israel menganut sistem multi partai karena beragamnya kelompok kepentingan, suku agama dan ras. Seperti yang telah disebutkan bahwa Israel menganut sistem pemerintahan parlementer. Kedudukan presiden di Israel lebih kepada simbolik, sedangkan yang memegang peranan penting di eksekutif adalah perdana menteri yang dipilih dari ketua partai politik peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif. Sistem tersebut berlaku dari pemilu pertama tahun 1949 hingga pemilu ke-13 tahun 1992. Sejak pemilu ke-14 tahun 1996, diberlakukan sistem pemilihan langsung Perdana Menteri yang terpisah dari pemilu anggota Knesset. (Rahman, Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian 2002)

Lamannya suatu pemerintahan Israel memerintah rata-rata sekitar 22 bulan terhitung sejak diresmikannya pemerintahan baru pasca diadakannya pemilu. Proses perdamaian dengan Palestina, peranan agama dalam negara, dan skandal-skandal politik seringkali

merupakan sebab retaknya koalisi antara partai satu dengan yang lainnya didalam Knesset dan mengakibatkan pemilu yang lebih cepat. Hukum-hukum dasar Israel (bahasa Ibrani: היסוד חוקי, *hūkkēi ha-yyəsōd*) berfungsi sebagai konstitusi tak tertulis negara. Pada tahun 2003, Knesset mulai mengajukan draf konstitusi resmi yang didasarkan pada hukum-hukum dasar ini. (Mazie 2006)

Dalam pembagian wilayah administratifnya, Israel dibagi menjadi enam distrik administratif utama, disebut sebagai mehozot (מחוזות; mahoz) , yaitu Distrik Tengah, Distrik Haifa, Distrik Yerusalem, Distrik Utara, Distrik Selatan, dan Distrik Tel Aviv. Distrik-distrik ini lebih jauh lagi dibagi menjadi lima belas subdistrik yang disebut nafot (נפות; nafa). (Central Bureau of Statistics 2007) Administrasi pembagian atas distrik yang ada di Israel, semuanya dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Israel. Selain itu, ada tiga bentuk pemerintah daerah di Israel yang pertama dewan kota, yang kedua dewan lokal dan yang ketiga yaitu dewan daerah. Dalam tugas nya, dewan kota memerintah munisipalitas yang tergolong kota dan masyarakat nya cenderung urban, dewan lokal memerintah munisipalitas kecil, dan dewan daerah memerintah sekelompok masyarakat. Pemerintah daerah terdiri dari dewan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang walikota dan seluruh anggota dewan dipilih dalam pemilihan daerah. (Wikipedia, Sistem pemerintahan Israel 2016)

1. Badan Eksekutif

Dalam pemerintahan di Israel, Presiden Israel merupakan kepala negara secara de jure. Secara posisi dalam pemerintahan peran nya hanya sebagai simbol saja dan tidak di

anggap sebagai bagian dari cabang pemerintahan eksekutif. Walaupun demikian, Presiden tetap memiliki peran tersendiri dalam pemerintahan di Israel contohnya menandatangani undang-undang, perjanjian internasional, menunjuk gubernur bank Israel dan menunjuk hakim. Selain itu, di Israel Presiden merupakan satu-satunya pejabat pemerintahan yang dapat memberikan amnesti bagi narapidana. (The Office of the President of Israel 2010)

Dalam cabang pemerintahan eksekutif, Perdana Menteri merupakan tokoh politik yang paling kuat di Israel. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden atas rekomendasi perwakilan partai di Knesset. Ia berwenang untuk membuat kebijakan dalam dan luar negeri yang kemudian akan ditentukan oleh kabinet yang merupakan menteri-menteri di Israel. Menteri ditunjuk oleh Perdana Menteri berdasarkan distribusi suara partai politik. Komposisi kabinet juga harus disetujui oleh Knesset. Perdana Menteri dapat memberhentikan anggota kabinet, tetapi setiap penggantian harus disetujui oleh Knesset.

Ada yang berbeda dalam kabinet di Israel dimana beberapa menteri akan membentuk kabinet keamanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet ini bertanggung jawab atas segala keputusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri dan pertahanan Israel. Forum ini dibuat untuk mengkoordinasikan berbagai negosiasi diplomatik dan untuk membuat keputusan lebih cepat dan efektif di saat krisis perang terjadi di Israel.

Pemerintahan Israel terdiri dari 28 kementerian, (White Pages 2013) yang bertanggung jawab untuk masing-masing sektor administrasi publik. Banyak kementerian yang terletak di kompleks pemerintahan Kiryat Ben Gurion di daerah Givat Ram,

Yerusalem. Masing-masing kementerian dipimpin oleh seorang menteri, yang juga merupakan anggota kabinet dan umumnya anggota Knesset. Kantor Perdana Menteri mengkoordinasikan kinerja dari semua kementerian dan melayani serta membantu Perdana Menteri dalam pekerjaan sehari-hari. (Israel Government Portal 2015)

2. Badan Legislatif

Badan Legislatif Israel memiliki nama lain yaitu Knesset dan merupakan *house of representatives* di Israel. (American-Israeli Cooperative Enterprise 2017) Knesset berkedudukan di kota Yerusalem. Knesset beranggotakan 120 orang yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun melalui perwakilan proporsional daftar partai sebagaimana diamanatkan oleh Hukum Dasar Knesset 1958. (Knesset 2015) Kursi di Knesset dialokasikan kepada masing-masing partai menggunakan metode D'hondt dari perwakilan proporsional daftar partai. Partai memilih calon menggunakan daftar tertutup. Dengan demikian, pemilih hanya memilih partai pilihan mereka bukan calon tertentu. Agar mendapat kursi, setiap partai harus memenuhi ambang batas parlemen 3,25%. (Lis 2014) Semua warga Israel yang sudah berusia 18 tahun atau lebih tua dapat menggunakan hak suara dalam pemilu legislatif, yang dilakukan dengan pemungutan suara rahasia.

Dalam setiap periode pemerintahan di Israel, Knesset yang baru mulai berfungsi setelah diadakan nya pemilu. Knesset bekerja dalam dua bentuk yaitu Pleno dan Komisi (komite). Sidang pleno biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun dengan jarak antara Pleno pertama dan kedua sekitar delapan bulan. Sidang dapat berlangsung apabila minimal 30 anggota dari Knesset hadir. Keputusan hasil sidang pleno berdasarkan suara

mayoritas anggota Knesset yang hadir, kecuali untuk kasus-kasus tertentu dimana suara mayoritas anggota yang tidak hadir pun tetap di perhitungkan. Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang atau wakilnya dan terbuka untuk umum.

Sidang Pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan Permusyawaratan. Faksi di Knesset dapat mengajukan mosi tidak percaya di Parlemen. Pada saat itu Knesset mengkaji mosi yang diajukan dan apabila mosi tidak percaya disetujui oleh minimal 61 orang anggota Knesset atau setengah + 1 maka fungsi pemerintahan akan berakhir dan pemerintahan baru akan didirikan. (American-Israeli Cooperative Enterprise 2017)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Knesset juga bekerja dalam Komisi-komisi tersendiri. Knesset memiliki 12 komisi umum dan 3 komisi khusus yang bekerja dalam bidangnya masing-masing antara lain:

Tabel 0.1 Komisi di Pemerintahan Israel

Komisi Umum	Komisi Khusus
<ul style="list-style-type: none"> • Komite untuk Memajukan Status Perempuan; • Konstitusi, Hukum dan Komite Kehakiman; • Komite Urusan Ekonomi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite on Drug Abuse; • Komite Hak Anak; • Komite untuk Pekerja Asing

<ul style="list-style-type: none"> • Komite Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga; • Komite Keuangan; • Komite Luar Negeri & Pertahanan; • Komite DPR; • Komite Imigrasi dan Penyerapan; • Komite Urusan & Lingkungan internal; • Komite Tenaga Kerja dan Kesejahteraan; • Komite Ilmu Pengetahuan & Teknologi; • Komite Kontrol Negara 	
---	--

Ketua Komisi di Knesset dipilih oleh anggota Komisi tersebut atas rekomendasi dari *House of Representative*. Setiap Komisi dapat membentuk sub-Komisi dan bisa juga membentuk Komisi bersama untuk isu-isu yang harus ditangani oleh lebih dari satu komisi. Untuk memecahkan suatu masalah biasanya mereka mengadakan sidang komisi. Sidang Komisi harus diikuti oleh anggota masing-masing Komisi, Sidang Komisi dipimpin oleh seorang pimpinan dibantu seorang Sekretaris. Biasanya, Sidang Komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari Komisi yang bersangkutan

Selain fungsi legislasi setiap Komisi di Knesset juga bertugas untuk membahas peraturan pemerintah melalui sidang Pleno. Dalam pembahasan suatu isu Komisi di Knesset biasanya mengundang menteri, pejabat senior dan juga ahli dalam hal yg sedang dibahas agar masalah yang dihadapi bisa terpecahkan dengan cepat.

3. Badan Yudikatif

Badan Yudikatif atau Badan Peradilan di Israel dikelola oleh Direktorat Pengadilan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Badan Peradilan di Israel mencakup beberapa tingkatan Peradilan antara lain:

- a. Mahkamah Agung
- b. Pengadilan Distrik
- c. Pengadilan Magistrates (Pengadilan untuk urusan umum)
- d. Pengadilan Tenaga Kerja Nasional
- e. Pengadilan Tenaga Kerja Regional

Seluruh badan peradilan ini tersebar di 50 wilayah di Israel termasuk di enam distrik yang ada. Badan Peradilan di Israel bertindak sebagai pengawas atas segala aturan hukum dan hak-hak individu seperti yang dilakukan lembaga-lembaga serupa di negara lain. Namun, karena tidak adanya konstitusi yang utuh dan aturan sisa peninggalan mandat inggris ditambah kekuasaan yang luas dari badan legislatif akhirnya menempatkan badan peradilan di Israel dalam posisi yang lebih penting.

Sistem Peradilan di Israel dibagi menjadi dua jenis, yang pertama yaitu pengadilan hukum umum yang dikenal sebagai pengadilan sipil atau biasa. Dan yang kedua yaitu

pengadilan hukum khusus. Perbedaan antara kedua jenis lembaga ini terletak pada tingkat yuridiksi nya atau mengenai hal apa yang diatur oleh lembaga tersebut sehingga dipakai untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Tabel 0.2 Jenis-jenis Pengadilan di Israel

Jenis Pengadilan	Jumlah Hakim	Kasus
Pengadilan Hakim (Magistrates)	1 hakim	Tindak pidana sipil dan minor
Pengadilan Negeri	1 atau 3 hakim	Yurisdiksi banding atas pengadilan hakim, yurisdiksi asli dalam kasus perdata dan pidana yang lebih tinggi
Mahkamah Agung	1, 3, atau 5 hakim	Banding, Peradilan pemerintah, menteri dan seluruh pejabat publik / lembaga, Berkuasa untuk membebaskan orang yang ditahan atau dipenjara secara ilegal
Pengadilan Khusus	1 hakim	Lalu lintas, tenaga kerja, remaja dan administrasi

Pengadilan Agama	1 atau 3 hakim	Yurisdiksi dalam hal perkawinan dan perceraian di pengadilan rabbi Yahudi, pengadilan gerejawi bagi orang Kristen, pengadilan bagi orang Islam dan Druze
------------------	----------------	--

Sistem hukum Israel mengakui berbagai jenis pengadilan, yang paling penting adalah pengadilan militer, pengadilan tenaga kerja, dan pengadilan agama. Pengadilan ini dibedakan dari yang paling pengadilan lain baik dari segi yurisdiksi pribadi dan materi mereka. Setiap pengadilan terdiri dari sistem peradilan dengan administrasi independen dan sistem banding sendiri yang meliputi hakim secara hukum terlatih.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya sistem hukum di Israel di bagi kepada dua jenis. Pengadilan ini dibedakan dari segi yuridiksi dan materi dalam persidangan. Setiap pengadilan terdiri dari sistem peradilan dengan administrasi independen dan sistem banding sendiri. Pengadilan khusus yang ada di Israel antara lain:

a. Pengadilan militer

Pengadilan ini dibentuk oleh Badan Hukum Militer pada tahun 1955. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk mengadili prajurit yang melanggar aturan hukum militer ataupun sipil. Dalam situasi tertentu terdakwa dapat melakukan banding langsung ke Mahkamah Agung.

b. Pengadilan tenaga kerja

Knesset mendirikan pengadilan tenaga kerja pada tahun 1969, hal ini dilakukan karena kesadaran akan perlunya sistem peradilan dalam perburuhan yang bisa digunakan untuk mengatur ketetapan hak-hak buruh. Terdapat lima mahkamah buruh daerah di Israel sebagai pengadilan pertama dan Mahkamah Buruh Nasional di Yerusalem untuk mendengar banding dan beberapa kasus yang menyangkut negara. Mahkamah buruh mempunyai yurisdiksi eksklusif mengenai kasus berkaitan dengan hubungan perusahaan-buruh, pekerjaan, mogok kerja dan sengketa serikat buruh, komplain buruh terhadap Institut Asuransi Nasional, dan klaim Asuransi Kesehatan.

c. Pengadilan Agama

Untuk kasus yang berkaitan dengan keluarga (umumnya pernikahan dan perceraian) akan masuk di bawah yurisdiksi pengadilan agama atau bersamaan dengan pengadilan keluarga negara. Negara mengurus Rabbi, pengadilan syariah dan lainnya untuk kebutuhan masing-masing agama di Israel. Semua hakim adalah pegawai negeri dan perlu untuk menjunjung tinggi hukum negaranya juga. Mahkamah Agung juga berfungsi sebagai pengadilan banding akhir untuk semua pengadilan agama. Agama besar lainnya di Israel, seperti Islam dan Kristen, mempunyai pengadilan agamanya sendiri. Pengadilan ini mempunyai yurisdiksi yang sama seperti pengadilan agama Yahudi, walau pengadilan agama Islam mempunyai kewenangan lebih dalam urusan keluarga.

d. Pengadilan Administratif

Di Israel, seperti di banyak sistem hukum Barat lainnya, ada tren yang berkembang untuk menempatkan isu-isu hukum tertentu di tangan pengadilan administratif khusus

yang dirancang untuk memenuhi fungsi yudisial. Pengadilan administratif dirancang untuk membantu badan badan administratif dalam hal kewajiban pajak, kompensasi dan manfaat sosial lainnya.

B. Partai Politik di Israel

Dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah partai yang ikut serta dalam pemilu anggota Knesset relatif tinggi. Hal ini menyebabkan Knesset terpecah-pecah dengan partai kecil memiliki perwakilan di Knesset dan tidak ada partai yang mendapat lebih dari 60 kursi yang diperlukan untuk membentuk Pemerintahan sendiri. Israel menganut sistem multi partai. Faktor beragamnya suku, agama, strata sosial dan juga entitas lainnya menyebabkan munculnya banyak sekali Partai politik di Israel sebagai wadah aspirasi anggota nya dan masyarakat. (Wikipedia 2017)

Pemilihan umum biasanya diadakan setiap empat tahun sekali untuk menentukan siapa yang berhak menduduki Knesset tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diadakan lebih awal apabila ada mosi tidak percaya di pemerintahan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Israel menganut sistem pemerintahan parlementer. Kedudukan presiden di Israel lebih kepada simbolik, sedangkan yang memegang peranan penting di eksekutif adalah perdana menteri. Perdana Menteri dipilih dari ketua partai politik peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif. Sistem tersebut berlaku dari pemilu pertama tahun 1949 hingga pemilu ke-13 tahun 1992. Sejak pemilu ke-14 tahun 1996,

diberlakukan sistem pemilihan langsung Perdana Menteri yang terpisah dari pemilu anggota Knesset. (Rahman 2002)

Dalam sistem pemilu yang terdahulu, presiden memberi wewenang pada ketua partai peraih suara terbanyak untuk membentuk kabinet dalam jangka waktu tiga minggu. Jika dalam tiga minggu ketua partai tersebut berhasil menyusun kabinet dan mendapat persetujuan separuh lebih satu anggota Knesset, maka ketua partai tersebut akan resmi menjadi perdana menteri. Namun apabila gagal, maka presiden akan memberi wewenang pada ketua partai peraih suara terbanyak kedua dan seterusnya untuk menduduki jabatan Perdana Menteri. (Rahman 2002) Akan tetapi, dari pengalaman pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang terbentuk dari koalisi dua partai besar yaitu Partai Buruh dan Partai Likud dari tahun 1988 hingga tahun 1992 yang membagi secara bergantian jabatan Perdana Menteri, mulai muncul permasalahan baru dalam menjalankan pemerintahan yang seringkali gagal mengakibatkan adanya vakum dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Dari pengalaman tersebut, muncul opini umum yang meminta agar adanya pemisahan pemilihan umum antara Perdana Menteri dan Knesset. Permintaan tersebut direalisasikan pada pemilu 1996. Pada pemilu tersebut, Partai Likud lewat Benyamin Netanyahu berhasil memenangkan pemilu Perdana Menteri dan menjadikan Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel saat itu. Pada tiga tahun pertama, yaitu tahun 1996 hingga 1999 merupakan percobaan pertama dari sistem pemilu yang baru tersebut.

Dari percobaan tersebut terlihat kelemahan yang besar dari sistem pemilu tersebut. Cara Perdana Menteri menjalankan pemerintahan ternyata lebih mirip sebagai presiden

pada sistem pemerintahan presidensial, dimana Perdana Menteri bisa dengan leluasa mengabaikan parlemennya dan lebih mendengarkan masukan dari penasihat di parlemen. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan sistem politik Israel yang menganut sistem pemerintahan Parleментар. Selain itu , Knesset juga tidak mampu mengontrol pemerintahan karena tidak terdapat koalisis partai pemenang pemilu di Parlemen sehingga susah sekali menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri yang memang membutuhkan dua per tiga lebih satu atau 81 suara anggota Knesset. Melihat ternyata sistem pemilu tersebut memiliki lebih banyak kelemahan daripada sistem pemilu yang lama, maka sejak tahun 2001 sistem pemilu Israel kembali menjadi sistem pemilu seperti sebelum tahun 1996.

Hampir 200 partai politik yang berbeda pernah mengikuti pemilu raya Israel sejak tahun 1948. Sebagian besar partai-partai ini hanya eksis beberapa tahun saja bahkan sebagian sudah tidak ada. Setidaknya 110 partai sudah pernah memenangkan pemilu dan mengirimkan perwakilan nya di parlemen. Dari 110 partai politik yang pernah menduduki jabatan di parlemen, ada beberapa partai yang memiliki pengaruh yang cukup besar baik dalam kebijakan selama pemerintahannya ataupun dukungan dari masyarakat di Israel.

1. Partai Likud

Likud secara bahasa berarti konsolidasi adalah sebuah partai politik sayap kanan di Israel. (Matthieussent 2012) Partai ini didirikan pada tahun 1973 oleh Menachem Begin dalam aliansi dengan beberapa partai sayap kanan dan liberal yang menjadi rival Partai Buruh. Partai-partai tersebut yaitu Herut, Gahal, Liberal,

Shlomizion dan Progesif. Partai Likud berasal dari imigran Yahudi Eropa yang datang pada tahun 1930-an akibat tekanan dan kekejaman nazi Jerman. Orang-orang Likud ingin mengusir orang Arab, dan ini sebagai akibat dari dendam atas kekejaman Nazi Jerman.

Kemenangan Likud dalam pemilu 1977 merupakan titik balik besar dalam sejarah politik negara itu, menandai pertama kalinya hilangnya kekuatan kiri. Selain itu, itu adalah pertama kalinya di Israel bahwa partai sayap kanan memenangkan pluralitas suara. Adapun beberapa tokoh penting yang ada dalam partai Likud sejak awal partai ini berdiri. Yang pertama yaitu Zeev Jabotinsky, kedua Menachim Begin yang pernah menduduki kursi Perdana Menteri Israel periode 1977-1983, yang ketiga ada Yitzhak Shamir mantan Perdana Menteri Israel periode 1983-1984 dan 1986-1992. Selanjutnya ada Ezer Weizman yang merupakan mantan Presiden Israel, yang kelima ada Ariel Sharon yang juga mantan Perdana Menteri Israel periode 2001-2006. Ariel Sharon juga pernah menjadi pemimpin partai Likud namun, pada Desember 2005 Sharon mengundurkan diri dari partai dan membentuk partai baru bernama Kadima. Dan tokoh lainnya yaitu Benyamin Netanyahu yang semenjak tahun 2009 hingga saat ini menduduki jabatan Perdana Menteri di Israel. Netanyahu juga pernah menduduki jabatan ini pada periode 1996-1999. (Wikipedia 2016)



Gambar 0.1 Logo Partai Likud

Prinsip paling penting dari partai ini adalah bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang dijanjikan atau *Promised Land* yang merupakan hak bangsa Yahudi. Selain itu juga, partai ini menyerukan pentingnya kesatuan bangsa Yahudi di seluruh dunia dan upaya mengusir keluar bangsa Palestina dari Tanah Palestina. Adalah penting bagi Bangsa Yahudi disuruh dunia untuk menyadari bahwa bermigrasi ke Palestina merupakan suatu keharusan. Program Partai Likud akan mengkonsentrasikan pada upaya pemberian garansi keamanan secara nasional dan personal bagi Bangsa Israel, bahwa keamanan Bangsa Israel jauh lebih penting dari perjanjian damai manapun.

2. Partai Buruh

Partai Buruh didirikan pada tahun 1968 melalui koalisi antara Mapai, Ahdut Ha'avodah dan juga Rafi Buruh. (Knesset 2016) Partai ini cenderung ke arah kiri-tengah. Setelah kemenangan Menachim Begin pada pemilu 1977, Semua Perdana Menteri berasal dari partai Buruh. Para pemimpin partai Buruh Yitzhak Rabin, Shimon Peres dan Ehud Barak pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Partai ini sekarang dipimpin oleh Issac Herzog. Partai Buruh Israel juga merupakan partai politik sosial-demokratis. Ideologi ini didasarkan pada nilai-nilai gerakan buruh Yahudi, yang pada prakteknya merupakan produk dari pengalaman sosial dan warisan dari orang-orang Yahudi terdahulu. (American-Israeli Cooperative Enterprise 2017)



Gambar 0.2 Logo Partai Buruh

Partai Buruh memiliki pandangan yang pragmatis dalam pendekatannya. Partai ini menyatakan perlunya ada kompromi atau negosiasi baik di kancah domestik maupun luar negeri dalam rangka menjaga stabilitas politik dan kepentingan Israel. Partai Buruh memiliki komitmen dan prinsip mendasar untuk memelihara bentuk pemerintahan yang demokratis dengan adanya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semua warga Israel. Selain itu, Partai ini juga menekankan prinsip pasar bebas sebagai bentuk penguatan ekonomi dan juga Partai Buruh berusaha untuk tercapainya perdamaian secara komprehensif dengan tujuan akhir keamanan di Timur Tengah dan mendukung keberagaman sosial serta kesetaraan. (Knesset 2016)

Dalam hal perundingan Perdamaian, Partai Buruh cenderung tidak *offensif*. Hal pernah terjadi kenangan ketika Buruh yang saat itu memang pro terhadap perdamaian di bawah kepemimpinan Yitzhak Rabin yang melahirkan kesepakatan Oslo. Orientasi terhadap perdamaian oleh Partai Buruh memang dianggap lebih pragmatis dibandingkan dengan Partai Likud yang cenderung agresif dalam menangani masalah perdamaian.

3. Partai Kadima

Kadima secara bahasa berarti ke depan, adalah partai politik yang beraliran tengah dan liberal di Israel. Partai ini didirikan pada 24 November 2005 oleh kaum moderat dari Partai Likud yang mendukung usulan Ariel Sharon mengenai penarikan diri orang Israel dari Jalur Gaza dan empat permukiman di Tepi Barat bagian utara, (CNN 2005) dan kemudian diikuti oleh politisi Partai Buruh. (Shipman dan Kraft 2009) Dengan Ehud Olmert sebagai ketua partai setelah Sharon terkena stroke, partai ini menjadi partai terbesar di Knesset setelah Pemilu Legislatif 2006, memenangi 29 dari 120 kursi, serta memimpin pemerintahan koalisi. Meskipun Kadima juga memenangi sebagian besar kursi pada Pemilu Legislatif 2009 di bawah kepemimpinan Tzipi Livni, Kadima menjadi partai oposisi untuk pertama kali sejak dibentuknya pemerintahan yang dipimpin Likud.



Gambar 0.3 Logo Partai Kadima

Kadima memiliki program atau *platform* sebagai sebuah partai politik yaitu mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi yang berbentuk demokratis. Mengontrol permukiman di wilayah Yerusalem dan Tepi barat di bawah otoritas Israel. Mengakhiri konflik Israel-Palestina dan mencapai *two state solution* sebagai bentuk peta jalan damai. Hal ini akan dilakukan bertahap dengan dilakukannya pemberantasan organisasi terorisme, memutus aliran senjata ke kelompok teror, melaksanakan reformasi keamanan

otoritas Palestina dengan *output* akhir pembentukan Palestina sebagai negara *Demilitarized* untuk menghindari teror dan konflik. (American-Israeli Cooperative Enterprise 2005)

C. Kemenangan Partai Likud dalam Pemilu Raya Israel Tahun 2013

Beragamnya latar belakang ras, suku, agama dan strata sosial di Israel menyebabkan beragamnya partai politik yang ada di negara ini. Menurut Professor Meriam Budiarjo, Pengertian Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya. Ketika sebuah partai berhasil menang dalam pemilu berarti cita-cita anggota partai dan juga pemilih partai tersebut secara otomatis tercapai.

Salah satunya yaitu Partai Likud yang berhasil menang pada pemilu di Israel tahun 2013 hasil dari koalisi nya dengan Partai Yisrael Beiteinu. Selain di tahun 2013, sebelumnya partai Likud juga pernah beberapa kali memenangkan hati pemilih pada pemilu raya di Israel yang membuat pemerintahan saat itu dipimpin oleh partai Likud. Untuk melihat perkembangan Pemilu di Israel, penulis mencoba menyajikan tabel para pemenang pemilu mulai dari pemilu pertama hingga pemilu terakhir tahun 2015.

Untuk mengetahui partai politik yang ada di Israel, penulis menyajikan tabel perolehan suara dalam pemilu raya tahun 2013 dimana partai Likud berhasil menduduki posisi pertama sebagai partai pemenang pemilu berdampingan dengan Yisrael Beiteinu :

Tabel 0.3 Perolehan Suara Pemilu Israel tahun 2013

PEMILU RAYA ISRAEL 2013					
Partai	Ketua	Suara	%	Kursi	+/-
Likud - Yisrael Beiteinu	Benjamin Netanyahu	884.631	23,32%	31	▼ -11
Yesh Atid	Yair Lapid	543.280	14,32%	19	▲ +19
Partai Buruh	Shelly Yachimovich	432.083	11,39%	15	▲ +7
The Jewish Home	Naftali Bennett	345.935	9,12%	12	▲ +7
Shas	Eli Yishai	331.800	8,75%	11	▲ +1
United Torah Judaism	Yaakov Litzman	196.038	5,17%	7	▲ +2
Hatnuah	Tzipi Livni	189.168	4,99%	6	▲ +6
Meretz	Zahava Gal-On	172.382	4,54%	6	▲ +3
United Arab List-Ta'al	Ibrahim Sarsur	138.362	3,65%	4	— 0
Hadash	Mohammad Barakeh	113.610	3,00%	4	— 0
Balad	Jamal Zahalka	96.926	2,56%	3	— 0
Kadima	Shaul Mofaz	79.487	2,09%	2	▼ -19

Selain tahun 2013, memang sudah beberapa kali memenangkan pemilu raya di Israel seperti yang penulis sampaikan diatas dan dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 0.4 Daftar Partai Pemenang Pemilu di Israel

Pemilu ke- (Tahun)	Jumlah Suara Masuk	Partai Pemenang	Jumlah Kursi yang di dapat
Knesset Ke-20 (2015)	4,254,738	Likud	30
Knesset Ke-19 (2013)	3,579,115	Likud-Beiteinu	31
Knesset Ke-18 (2009)	3,373,490	Kadima	28
Knesset Ke-17 (2006)	3,137,064	Kadima	29
Knesset Ke-16 (2003)	3,148,364	Likud	38

Knesset Ke-15 (1999)	3,309,416	One Israel	26
Knesset Ke-14 (1996)	2,973,580	Labor	34
Knesset Ke-13 (1992)	2,616,841	Labor	44
Knesset Ke-12 (1988)	2,283,123	Likud	40
Knesset Ke-11 (1984)	2,073,321	Alignment	44
Knesset Ke-10 (1981)	1,937,366	Likud	48
Knesset Kesembilan (1977)	1,747,820	Likud	43
Knesset Kedelapan (1973)	1,566,855	Alignment	51
Knesset Ketujuh (1969)	1,367,743	Alignment	56

Knesset Keenam (1965)	1,206,728	Alignment	45
Knesset Kelima (1961)	1,006,964	Mapai	42
Knesset Keempat (1959)	969,337	Mapai	47
Knesset Ketiga (1955)	853,219	Mapai	40
Knesset Kedua (1951)	687,492	Mapai	45
Knesset Pertama (1949)	434,684	Mapai	46

Tampilnya Likud dibawah pimpinan Menachim Begin pada tahun 1977, Menurut Paul Findley merupakan suatu gempa bumi dalam politik dan kebijaksanaan di Israel. Kemenangan Begin menyingkirkan Partai Buruh pimpinan Ben-Gurion yang telah memerintah Israel sejak terbentuknya partai tersebut tahun 1948 dan menggantikannya dengan arah pemerintahan yang cenderung Revisionist Zionisme. Hal ini merupakan kemenangan nasionalis atas arus utama Zionisme Pragmatis dan Sekular dalam pemerintahan di Israel.

Apabila kita lihat tabel diatas, dari 20 kali pemerintahan israel yang ada, 6 diantaranya di kuasai oleh partai Likud dimana Likud berhasil menduduki posisi pemenang pemilu raya. Tidak ada partai lain di Israel yang melebihi rekor kemenangan partai likud dalam pemilu semenjak keikutsertaan partai tersebut dalam pemilu. Secara popularitas Likud memiliki pendukung yang cukup banyak yang bisa membantunya untuk menduduki puncak peraih suara terbanyak walaupun pada pemilu tahun 2013 partai Likud kalah tipis dari Kadima. Koalisi yang dibuat oleh partai Likud dan Yisrael Beiteinu membuatnya menang pada penghitungan suara di parlemen yang membuat Kadima akhirnya berada di posisi kedua.